

Seberapa Efektifkah Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk Menunjang Inovasi Otonomi Daerah? Analisis Kota Bogor

¹Widi Hastomo, ¹Andri Meiriki, ¹Ahmad Eko Saputro
¹ITB Ahmad Dahlan Jakarta, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten
e-mail: Widiie.has@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini lebih diarahkan kepada analisis kemampuan keuangan daerah dengan melihat derajat desentralisasi serta rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah. Tiga bentuk analisis ini akan menunjukkan apakah suatu daerah otonom mampu berdiri secara utuh dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Jenis penelitian ini merupakan *secondary data analysis*, metode analisis horizontal dan vertikal yang digunakan, lokasi penelitian dipilih secara (*purposive*) yaitu Kota Bogor. Data yang digunakan yaitu data administratif kelembagaan Pemerintah Kota Bogor, terdiri dari Laporan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2015-2019, serta data keuangan daerah yang tertuang pada laporan Badan Pusat Statistik Kota Bogor tahun 2015-2019. Hasil dari penelitian ini; (a) perhitungan rasio derajat desentralisasi dikategorikan sedang, (b) ketergantungan keuangan daerah selama 5 tahun di atas 50% hal ini berarti kota bogor dari sisi ketergantungan terhadap pemerintah pusat tinggi, (c) kota bogor dapat dikategorikan sedang dalam rasio kemandiriannya.

Kata Kunci: Desentralisasi, otonomi, horizontal, vertikal

Abstract

The purpose of this research is more directed to the analysis of regional financial capacity by looking at the degree of decentralization and the ratio of regional financial dependence and the ratio of regional financial independence. These three forms of analysis will show whether an autonomous region is able to stand fully by relying on its own regional financial capacity. Type of research is secondary data analysis, horizontal and vertical analysis methods are used, the research location was selected purposively, namely the city of Bogor. The data used are institutional administrative data, namely the Bogor City Government, consisting of the Regional Budget and Revenue Expenditure reports and the 2015-2019 Regional Government Implementation Report, as well as regional financial data contained in the report of the Bogor City Central Statistics Agency for 2015-2019. The results of this study; (a) the calculation of the ratio of the degree of decentralization is categorized as moderate, (b) the dependence of regional finances for 5 years is above 50%, this means that the city of Bogor in terms of high dependence on the central government, (c) the city of Bogor can be categorized as moderate in its independence ratio.

Keywords: Decentralization, autonomy, horizontal, vertical

PENDAHULUAN

Perubahan sistem manajemen keuangan daerah di Indonesia merupakan suatu konsekuensi dari adanya desentralisasi fiskal dan otonomi bagi daerah. Perubahan tersebut dapat dilihat dari perubahan kelembagaan pemerintahan, perubahan sistem anggaran, perubahan dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus perubahan dalam sistem akuntansi dan pertanggungjawabannya. Hal ini merupakan bentuk implementasi dari lahirnya undang-undang nomor 22 tahun 1999 sebagaimana terakhir di ubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah serta Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua undang – undang tersebut memberikan kewenangan kepada daerah dalam mendayagunakan potensi sumberdaya daerah secara optimal dalam rangka terpenuhinya kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang nomor 23 Tahun (2014) tentang pemerintahan daerah menekankan bahwa asas kemandirian daerah merupakan kunci dari pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah diselenggarakan dengan tujuan utama agar daerah mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan pembangunannya serta mengatur masyarakat di wilayahnya sehingga pelaksanaan otonomi dan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan diharapkan akan menjadi cara yang tepat untuk meningkatkan laju pembangunan dan pemerataan pembangunan, sehingga ketimpangan dan kesenjangan ekonomi antar daerah dapat di atasi (Ahmad, E., & Hastomo, 2020).

Adanya otonomi daerah yang merupakan konsep pembangunan ekonomi berbasis desentralisasi pemerintahan daerah mempunyai wewenang seluas-luasnya untuk menyelenggarakan dan mengatur pemerintahan yang mencakup kewenangan seperti mengatur pembangunan daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mengatur urusan pemerintahan lainnya. (Susilawati, Kusumastuti Wardana, & Fajar Rahmawati, 2018).

Kemampuan suatu daerah dalam menjalankan roda pemerintahan terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, yang artinya daerah seharusnya memiliki kemampuan untuk menemukan dan mencari berbagai sumber penerimaan daerah sendiri yang sifatnya berkelanjutan (Meiriki, A., Musharianto, A., & NS, 2020). Kemampuan keuangan daerah merupakan salah satu prasyarat untuk menentukan tingkat kemandirian daerah dalam menjalankan pemerintahan (Meiriki, 2004).

Salah satu ciri utama daerah mampu dalam melaksanakan otonomi daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proporsi yang semakin mengecil dan diharapkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah (Kamaroellah, 2017).

Beberapa penelitian terdahulu mengenai perkembangan kinerja keuangan daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah lebih menekankan kepada aspek efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran, serta bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan atas pelaksanaan keuangan daerah, serta proses dan tahapan dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana dari berbagai penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tolak ukur kinerja, merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran (Susanti, E., Raharjo, K., & Oemar, 2017). Penelitian sebelumnya mengenai Kota Bogor tahun anggaran 2010-2014 seperti yang dilakukan (Mutih, 2016) menyimpulkan bahwa pemerintah kota Bogor sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya, serta memiliki rasio pertumbuhan yang positif. Namun pemerintah kota Bogor masih memprioritaskan anggarannya dalam belanja tidak langsung dibandingkan dengan belanja langsung.

Penelitian ini lebih diarahkan kepada analisis kemampuan keuangan daerah dengan melihat derajat desentralisasi serta rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah. Dengan tiga bentuk analisis kemampuan keuangan daerah ini akan menunjukkan apakah suatu daerah otonom mampu berdiri secara utuh dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat

(Kaho, 1997) bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari cukup tidaknya kemampuan daerah dalam bidang keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Secondary data analysis*. Lokasi Penelitian dipilih secara (*purposive*) yaitu Kota Bogor sebagaimana pertimbangan yang dikemukakan pada perumusan masalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data administratif kelembagaan, yaitu Pemerintah Kota Bogor, terdiri dari laporan APBD Kota Bogor dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta data Keuangan Daerah yang tertuang pada laporan Badan Pusat Statistik Kota Bogor Tahun 2015-2019.

Tabel 1. Matriks Tujuan, Jenis Data, Teknik Analisis dan Keluaran Hasil Analisis

Tujuan Penelitian	Jenis Data	Metode & Teknik Analisis	Keluaran
Menganalisis struktur penerimaan dan struktur belanja daerah Kota Bogor dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.	Sekunder	1. Metoda Analisis Horizontal. - <i>Comparative</i> - <i>Trend Analysis</i> 2. Metoda Analisis Vertikal. - <i>Common-size Financial Statement</i> - <i>Ratios</i>	Indikator kunci Rasio efektivitas dan rasio efisiensi.
Menganalisis kemampuan keuangan daerah kota Bogor dengan memperhatikan derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah dan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Bogor.	Sekunder	3. Metoda Analisis Horizontal. - <i>Comparative</i> - <i>Trend Analysis</i> 4. Metoda Analisis Vertikal. - <i>Common-size Financial Statement</i> - <i>Ratios</i>	Indikator kunci Rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Penerimaan dan Struktur Belanja Daerah Kota Bogor

Untuk tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah, maka digunakan rasio efisiensi. (Mardiasmo, 2018) berpendapat untuk menghitung efisiensi pengelolaan keuangan dapat membandingkan antara realisasi penerimaan daerah terhadap realisasi belanja. Kriteria ini bersumber dari peraturan Kemendagri No.327 Tahun (1996) tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.

Pada tabel 2 di bawah ini menunjukkan kriteria kinerja efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan.

Tabel 2. Kategori Presentase Kinerja Keuangan

No	Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria Efektifitas	Kriteria Efisiensi
1	Diatas 100%	Sangat Efektif	Tidak Efisien
2	90% - 100%	Efektif	Kurang Efisien
3	80% - 90%	Cukup Efektif	Cukup Efisien
4	60% - 80%	Kurang Efektif	Efisien
5	Kurang dari 60%	Tidak Efektif	Sangat Efisien

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327 Tahun (1996)

Struktur Penerimaan/Komposisi Pendapatan Daerah Kota Bogor

Pada bagian ini, pembahasan yang dilakukan adalah apakah Pemerintah Daerah Kota Bogor telah efektif dalam merealisasikan pendapatannya dari target yang ditentukan pada tahun anggaran. Maka dari itu rasio yang digunakan adalah rasio efektifitas. Rasio efektifitas adalah kemampuan pemerintah daerah merealisasikan pendapatan asli daerah dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efektif suatu daerah dalam pengelolaan keuangannya (W. H. Saputro, Apyana, & Kalbuana, 2017), (Abdul Wahab, Rofingatun, & Kreuta, 2015).

Tabel 3. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	(%) Capaian	Kriteria
2015	627.815.080.243	627.597.050.141	99,97%	Efektif
2016	728.030.823.933	783.873.587.219	107,67%	Sangat Efektif
2017	917.788.606.450	978.197.741.947	106,58%	Sangat Efektif
2018	887.396.041.682	912.197.971.288	102,79%	Sangat Efektif
2019	972.607.288.978	1.015.884.216.920	104,45%	Sangat Efektif

Sumber: Olah Data 2020

Pada tabel 3 terlihat dari tahun 2016 hingga 2019 capaian kriteria yang semakin baik, dengan kategori sangat efektif, dengan capaian diatas 100% dari target.

Tabel 4. Pendapatan Transfer Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	(%) Capaian	Kriteria
2015	1.302.765.733.473	1.218.375.878.985	93,52%	Efektif
2016	1.352.588.061.017	1.297.444.479.820	95,92%	Efektif
2017	1.367.515.899.896	1.293.505.562.261	94,59%	Efektif
2018	1.329.137.583.755	1.303.322.063.609	98,06%	Efektif
2019	1.577.997.671.710	1.455.644.350.874	92,25%	Efektif

Sumber: Olah Data 2020

Pada tabel 4 dari tahun 2016 hingga 2019 capaian kriteria yang selalu konsisten dengan kategori efektif, capaian tersebut diatas 92% dari target.

Tabel 5. Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2015-2019

Tahun	Target	Realisasi	(%) Capaian	Kriteria
2015	91.689.947.500	67.237.474.910	73,33%	Kurang Efektif
2016	77.464.620.000	71.052.015.847	91,72%	Efektif
2017	26.569.800.000	17.656.058.467	66,45%	Kurang Efektif
2018	118.158.478.746	113.173.397.771	95,78%	Efektif
2019	89.365.600.000	88.328.640.000	98,84%	Efektif

Sumber: Olah Data 2020

Pada tabel 5 terjadi dua kali capaian yang kurang dari 74% yaitu pada tahun 2015 dan 2017, hal tersebut termasuk dalam kategori kurang efektif.

Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bogor

Kategori efisiensi pengelolaan keuangan dapat dicapai jika pendapatan daerah dapat mengimbangi belanja daerah. Jika pendapatan tidak dapat mengimbangi belanja daerah

maka akan terjadi defisit anggaran daerah, hal ini berlaku sebaliknya maka akan terjadi surplus anggaran daerah. Terjadinya surplus anggaran bisa jadi disebabkan oleh efisiensi dalam tata kelola keuangan. Pengelolaan keuangan daerah bisa dikatakan tidak efisien jika semakin besar rasio efisiensi (A. E. Saputro, 2020). Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintahan daerah semakin baik (Abdul Wahab et al., 2015).

Tabel 6. Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bogor

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Penerimaan	(%) Capaian	Kriteria
2015	1.862.982.871.234	1.913.210.404.036	97,37%	kurang efisien
2016	2.115.296.888.270	2.152.370.082.886	98,28%	kurang efisien
2017	2.245.590.002.914	2.289.359.362.675	98,09%	kurang efisien
2018	2.406.586.936.843	2.328.703.432.669	103,34%	tidak efisien
2019	2.526.506.949.919	1.015.884.216.920	248,70%	tidak efisien

Sumber: Olah Data 2020

Dari tabel 6 efisiensi pengelolaan keuangan dari tahun 2015 hingga 2017 dengan capaian diatas 97% hal ini dengan kriteria kurang efisien, sedangkan tahun 2018 dan 2019 dengan capaian diatas 100% dengan kriteria tidak efisien.

Derajat Desentralisasi

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan.

Derajat Desentralisasi Fiskal, dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Kategori Kemampuan Keuangan Daerah

Persentase	Kriteria
0,00-10,00	Sangat Kurang
10,01-20,00	Kurang
20,01-30,00	Cukup
30,01-40,00	Sedang
40,01-50,00	Baik
>50,00	Sangat baik

Hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 8. Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	RDD	Keterangan
2015	627.597.050.000	1.913.210.404.036	33%	Sedang
2016	681.623.900.000	2.152.370.082.886	32%	Sedang
2017	978.197.741.947	2.289.359.362.675	43%	Baik
2018	912.197.971.289	2.328.703.432.669	39%	Sedang
2019	1.015.884.216.920	2.559.857.207.794	40%	Baik
Rata-rata			37%	Sedang

Sumber: Olah Data 2020

Dari tabel di atas, tahun 2015 RDD 33% (sedang), tahun 2016 RDD 32% (sedang), tahun 2017 RDD 43% (baik), tahun 2018 RDD 39% (sedang), tahun 2019 RDD 40% (baik). Sedangkan rata-rata selama 5 tahun terakhir sebesar 37% dan masuk dalam kategori sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2019 Kota Bogor dapat dikategorikan sedang dalam Rasio Derajat Desentralisasinya.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$KKD = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Kategori ketergantungan keuangan daerah

Prosentase	Kriteria
0,00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Hasil perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dilihat pada tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2015-2019

Tahun Anggaran	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Ketergantungan Keuangan Daerah
2015	1.218.375.878.985	1.913.210.404.036	64%
2016	1.297.444.479.820	2.152.370.082.886	60%
2017	1.293.505.562.261	2.289.359.362.675	57%
2018	1.303.332.063.609	2.328.703.432.669	56%
2019	1.455.644.350.874	2.559.857.207.794	57%
Rata-rata			59%

Sumber: Olah Data 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Ketergantungan Keuangan Daerah selama 5 tahun di atas 50% hal ini berarti Kota Bogor dari sisi Ketergantungan terhadap Pemerintah pusat Tinggi.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Daerah adalah rasio yang mengukur tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah. Semakin tinggi rasio ini, artinya tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, sebaliknya bila rasio ini tinggi pada suatu daerah maka dapat dikatakan bahwa ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin tinggi.

Rasio ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 11. Kriteria Tingkat Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemandirian	Kriteria
0%-25%	Rendah Sekali
25%-50%	Rendah
50%-75%	Sedang
75%-100%	Tinggi

Berdasarkan rumus di atas maka hasil perhitungan rasio kemandirian Daerah Kota Bogor adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Rasio kemandirian Daerah Kota Bogor

Tahun	PAD	Transfer pusat + Provinsi+ Pinjaman	Rasio Kemandirian
2015	627.597.050.000	1.285.613.350.000	49%
2016	681.623.900.000	1.449.302.970.000	47%
2017	978.197.741.947	1.311.161.620.728	75%
2018	912.197.971.289	1.416.505.461.380	64%
2019	1.015.884.216.920	1.543.972.990.847	66%
Rata-rata			60%

Sumber: Olah Data 2020

Dari tabel di atas, tahun 2015 dan 2016 Kota Bogor tergolong rendah yaitu 49% dan 47% dalam kemandiriannya. Sedangkan mulai 2017 hingga 2019 Kota Bogor masuk dalam kategori Sedang. Secara rata-rata rasio kemandirian Daerah Kota Bogor sebesar 60% sehingga dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2015 hingga 2019 Kota Bogor dapat dikategorikan sedang dalam Rasio Kemandiriannya.

SIMPULAN

Simpulan yang dapat di sintesiskan dari pembahasan yaitu (a) rasio desentralisasi keuangan daerah Kota Bogor tahun anggaran 2015-2019 dalam kategori sedang, (b) rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Bogor tahun anggaran 2015-2019 terhadap pemerintah pusat dalam kategori tinggi, (c) dari tahun 2015 hingga 2019 Kota Bogor dapat dikategorikan sedang dalam Rasio Kemandiriannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, L. O., Rofingatun, S., & Kreuta, B. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Keuda*, 2(3), 1–17.
- Ahmad, E., & Hastomo, W. (2020). Edukasi Perencanaan Keuangan Bagi Calon Pemegang ke Jepang Ahmad. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3, 116–122. <https://doi.org/10.31960/caradde.v3i1.483>
- Kaho, J. R. (1997). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraanya. *Fisipol. Ugm. Ac. Id.*
- Kamaroellah, R. A. (2017). Analisis Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah. *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan*

- Keagamaan Islam*, 14(1), 123. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v14i1.1316>
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta.
- Meiriki, A., Musharianto, A., & NS, N. L. (2020). Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah. *Musamus Journal of Public Administration*, 3(1), 10–19.
- Meiriki, A. (2004). *Analisis Pusat Pemerintahan Dan Pemilihan Pusat Pertumbuhan Yang Optimal Dalam Pengembangan Wilayah*. Institut Pertanian Bogor.
- Mutiha, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2010 -2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.7454/jvi.v4i2.101>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan.* , (1996).
- Saputro, A. E. (2020). Analisis Harga Saham Syariah dan Volume Perdagangannya Sebelum dan Sesudah Pengumuman Covid 19. *Economic Dan Education Journal*, 2(2), 159–168.
- Saputro, W. H., Apyana, R., & Kalbuana, N. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Free Cash Flow, Investment Opportunity Set dan Leverage Terhadap Dividend Payout Ratio. *Seminar Nasional Dan The 4th Call for Syariah Paper 90*, 90–98.
- Susanti, E., Raharjo, K., & Oemar, A. (2017). *Analisis rasio laporan keuangan apbd (anggaran pendapatan daerah) sebagai tolok ukur kinerja keuangan pemerintah kota salatiga tahun anggaran 2012-2016*. 1–16.
- Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(2), 91–98. <https://doi.org/10.18196/jati.010210>
- Undang-Undang Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.* , (2014).

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini didukung oleh LP3M ITB Ahmad Dahlan Jakarta dalam Program Penelitian Internal Dosen berdasarkan perjanjian hibah dengan Nomor: 08/Kontrak/Penelitian/LP3M/2020.